

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena demokrasi telah menjadi wacana luas sejak berakhirnya perang dingin ditahun 1991. Runtuhnya simbol kekuasaan komunis yakni Uni Soviet menjadi determinasi penerimaan konsep demokrasi secara menyeluruh oleh sebagian besar negara–negara di dunia.<sup>1</sup>

Demokrasi telah dianggap sebagai sebuah instrumen dalam menjalankan sebuah konsepsi negara yang ideal dalam menjawab persoalan dan penegakan kekuasaan rakyat. Demokrasi muncul sebagai kebutuhan dan masalah apabila kehidupan bernegara yang dicita–citakan sebagai kehidupan bernegara yang demokratis belum terwujud seperti yang diharapkan. Karena itu, demokratisasi merupakan suatu proses yang hendak mengatasi batasan–batasan diskriminatif, untuk merealisasi atau menyempurnakan kehidupan demokrasi. Sehingga warga atau lapisan masyarakat tidak terhalang oleh status atau hak–hak sosialnya, dapat berpartisipasi dalam berbagai aktifitas yang menyangkut urusan–urusan publik dan pemerintahan.

Demokrasi terus tumbuh dan berkembang dalam proses transisi politiknya yang mengalami berbagai pendewasaan perilaku politik negara dan rakyatnya. Kesemuanya adalah hal yang diharapkan akan bermuara pada sebuah kondisi perpolitikan yang ideal. Di Indonesia, proses pendewasaan

---

<sup>1</sup> *Kedudukan Demokrasi dalam Pemikiran Barat Sejak Plato Hingga Marx*, diakses tanggal 3

demokrasi telah melalui masa 13 tahun sejak tahun 1999. Setelah sebelumnya perkembangan demokrasi di Indonesia telah terjadi pasang surut sedemikian rupa. Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa awal kemerdekaan, kedua adalah demokrasi terpimpin, yaitu ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin, ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto, dan keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi.<sup>2</sup>

Indonesia telah melewati berbagai proses yang penuh dengan dinamika kehidupan demokrasi. Dalam periode 13 tahun kebelakang telah banyak perubahan yang dialami Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi, diantaranya adalah amandemen UUD 1945, kebebasan pers, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul.

Transisi dari pemerintahan nondemokratis menuju pemerintahan yang demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah tahapan. Transisi menuju demokrasi diawali dengan runtuhnya rezim pemerintahan otoriter, tahapan ini akan diakhiri dengan pembentukan sebuah pemerintahan yang baru berdasarkan pemilihan yang bebas. Namun prosesnya tidak berakhir di situ saja, rezim pemerintahan yang baru sering kali menjadi demokrasi terbatas, lebih demokratis dari pemerintahan yang

---

<sup>2</sup> Sidik Jatmika, *Demokrasi dan Demokratisasi: AS Penghambat Demokrasi*, Yogyakarta: BIGRAF Publising, 2000, Hal. 12-13

sebelumnya, namun belum demokratis sepenuhnya. Beberapa tahapan pendalaman tentang demokrasi mungkin dibutuhkan.

Transisi demokrasi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan dalam tahap awal pergerakan menuju kepada demokrasi. Lebih khusus lagi transisi tersebut digambarkan sebagai demokrasi yang lemah dan tidak solid serta banyak diterpa masalah-masalah sosial ekonomi yang parah dan gawat. Satu-satunya solusi yang menorehkan gambaran optimistis adalah proses organisasi mobilisasi massa dalam perjuangan untuk demokrasi harus bisa mencapai derajat yang lebih tinggi dari masa sebelumnya, sehingga diharapkan dapat mempersulit kembalinya sistem pemerintahan lama, yaitu otoriter.

Perkembangan politik di Indonesia tidak terlepas dari pendekatan terhadap perkembangan histori dan budaya, yaitu studi yang memperlihatkan munculnya kekuatan-kekuatan baru, baik diluar maupun di dalam struktur negara pasca reformasi atau runtuhnya rezim Soeharto.

Banyak ilmuan yang meneliti tentang perkembangan politik di Indonesia dari masa ke masa yang memberi dua gagasan utama terkait pemikiran pada masa reformasi. Pertama, menggambarkan bahwa runtuhnya rezim otoriter Soeharto merupakan titik awal Indonesia menuju kebebasan demokrasi, sehingga muncul pola-pola konsolidasi demokrasi. Artinya telah berlangsungnya perubahan (*change*) secara fundamentalis di tatanan

Kedua, memberi sumbangsih gagasan yang berbeda, bahwa fenomena ini merupakan keberlangsungan rezim orde baru yang masih massif dan berkembang (*continue*) sampai saat ini, dengan kata lain konsolidasi oligarki kekuasaan yang semakin menguat dan menyebar diberbagai lini perpolitikan di Indonesia. Maka, pluralitas kekuasaan akan mengundang kekuatan-kekuatan yang beriringan dengan proses transisi demokrasi yang membangun oligarki politik yang hegemonik. Studi tersebut melihat oligarki kekuasaan muncul kembali pasca reformasi. Kongkritnya adalah hadirnya kembali kepemimpinan yang bersifat otoriter dalam sistem pemerintahan yang demokrasi pasca reformasi, baik di tingkat lokal maupun ditingkat nasional.

Gambaran konsolidasi oligarki kekuasaan yang terjadi di Indonesia ialah, terjadinya pemerintahan dari proses rekrutmen pemimpin baik ditingkat daerah maupun ditingkat nasional yang berupaya mempertahankan status kekuasaan. Meskipun secara sistem dan aturan dalam perekrutan pemimpin dibatasi hanya dua kali periodeisasi, namun hal ini dapat disiasati dengan maksud agar kekuasaan tersebut tidak jatuh ketangan orang lain, yaitu dengan mencalonkan istri, anak atau kerabat dan keluarga, tanpa melihat dari kapabilitas dan integritas untuk menjadi pemimpin yang akan memperoleh kekuasaan dalam instansi pemerintah. Keadaan demikian tentu sangatlah mencederai demokratisasi yang sedang berlangsung di negeri ini.

Pada tingkatan nasional, dapat kita cermati pada salah satu pilar

demokrasi yaitu partai politik. Meski kebebasan partai untuk bernpolitik sudah

jauh berkembang bahkan dijamin oleh aturan yang cukup demokratis dibandingkan pada zaman sebelumnya, namun internal partai pada masa reformasi ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk dibenahi, untuk menuju partai yang demokratis. Sebagai contoh misalnya, masih sering muncul orang-orang kuat disebuah kelompok yang menjadi acuan pengambilan keputusan partai. Pengambilan keputusan masih sentralistik figur, dan tidak berdasarkan pada proses yang rasional demokratis.<sup>3</sup>

Sentralistik dalam pengambilan keputusan nampak pada beberapa DPP parpol yang masih memosisikan superstruktur yang mengatur dan pengambil keputusan pada semua permasalahan kepengurusan di daerah-daerah. Tidak nampak adanya desentralisasi pengambilan keputusan, yang dinilai lebih bisa menghargai daerah untuk dapat memutuskan persoalan yang menyangkut kepentingannya sendiri. Fenomena ini sering terlihat ketika menjelang pilkada disebuah daerah tertentu. Bahwa calon-calon dari fraksi masih dimintakan persetujuan pusat, atau pusat yang memilih dari beberapa calon yang diajukan daerah. Peristiwa ini sering terjadi dan menjadi aturan dibeberapa partai termasuk diantaranya adalah PDI-P, yaitu terjadi pada kasus pemilihan Gubernur di Jakarta, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.<sup>4</sup>

Besarnya kekuatan sentralisasi di PDI-P tidak lepas dari pesona kharismatik yang dimiliki salah satu Putri Bung Karno yakni Megawati Soekarnoputri. Personifikasi dirinya sebagai ruh PDI-P merupakan harga mati

---

<sup>3</sup> Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik Era*

yang tidak bisa ditawar. Akibatnya, Megawati menjadi penentu sentral dalam setiap kebijakan dan keputusan partai. Bahkan, segala keputusan politik yang dikeluarkan oleh partai disetiap tingkatan harus memperoleh persetujuannya, dan setiap kader wajib mengamankan rekomendasi yang diputuskannya selaku Ketua Umum PDI-P.

Kekuatan yang sangat berpengaruh tersebut merupakan implikasi dari hak prerogatif (hak istimewa) yang dimiliki Megawati selaku ketua umum PDI-P, sehingga sentralisasi dan oligarki kekuasaan pada partai yang berslogan partainya *wong cilik* ini tidak bisa dihindari. Bahkan ketika terjadi penolakan atau penentangan terhadap keputusan sang ketua umum, maka bisa dipastikan kelangsungan karir politik penentang tersebut akan terhenti, atau dengan kata lain dibebaskan tugas dari partai.

Dari sentralisasi kekuatan tersebut, timbul fenomena yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni munculnya konsolidasi oligarki kekuasaan. Dalam hal ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang merupakan salah satu kekuatan politik besar yang ada di Indonesia, justru mempraktekkan secara jelas oligarki kekuasaan diinternal partainya. Pada partai ini dapat dikatakan tidak terjadi regenerasi kepemimpinan. Terbukti dengan terpilihnya Megawati menjadi pemimpin partai dengan jabatan ketua umum selama tiga periode berturut-turut. Dengan demikian, hal ini menjadi *bias* terhadap demokratisasi sistem politik pemerintahan Indonesia yang menginginkan

Padahal jika dicermati sistem kepartaian Indonesia yang multipartai, maka seharusnya terbuka peluang untuk munculnya elite–elite (pemimpin) politik melalui partainya masing–masing. Partai politik sengaja dirancang untuk mengoptimalkan fungsi–fungsinya, antara lain sebagai sarana agregasi politik, sirkulasi elite dan perkaderan politik, manajemen konflik, serta sosialisasi dan komunikasi politik. Elite–elite politik yang ditempah atau di didik oleh lembaga partai politik diharapkan dapat tampil sebagai pemimpin–pemimpin yang tangguh dan penuh wibawa, tidak saja dimata konstituennya, tetapi juga disegenap spektrum masyarakat dan bangsa. Seperti yang tercantum dalam Undang–Undang No. 2 tahun 2008 pasal 11 ayat 1 poin ke-5, fungsi partai politik adalah sebagai alat rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dari fungsi yang tercantum pada ayat tersebut, maka timbul pertanyaan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam pengisian jabatan politik, khususnya dalam hal pemilihan ketua umum yang seharusnya telaksana melalui mekanisme dan prinsip–prinsip demokrasi serta menghadirkan sirkulasi/regenerasi kepemimpinan.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan mengangkat judul: *"Demokratisasi Partai*

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana demokratisasi pada aspek regenerasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah menjadi penting dan perlu untuk dituliskan, dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman dan penyimpangan penafsiran terhadap judul penelitian, sekaligus untuk menemukan fokus masalah. Untuk itu penulis membatasi ruang lingkup masalah, dimana penelitian ini hanya akan mengkaji mengenai regenerasi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang dikaitkan dengan demokratisasi sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang menginginkan demokrasi.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **D.1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui demokratisasi pada aspek regenerasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

### **D.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan diatas, maka diharapkan kemudian ada manfaat yang ditimbulkan dari hasil penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai



### **D.2.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini merupakan kajian ilmu politik yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, terutama dibidang politik dan khususnya mengenai demokratisasi pada regenerasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

### **D.2.2. Manfaat Praktis**

1. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran faktual tentang bagaimana demokratisasi partai politik, khususnya dalam hal regenerasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan berfikir secara akademis dalam melihat demokratisasi pada regenerasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sekaligus menambah literatur kepustakaan bagi yang tertarik untuk mengkaji pada bidang dan permasalahan yang sama.

## **E. Kerangka Teori**

Didalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, dibutuhkan kerangka teori untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori ini kemudian akan digunakan sebagai landasan berfikir dalam penelitian,

Teori merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis, atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>5</sup> Berikut teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini:

### **E.1. Demokrasi**

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Demos*” yang berarti rakyat, dan “*Kratos*” yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat dalam suatu masyarakat. Demokrasi juga dimaknai sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah atau rakyat yang memiliki kedaulatan untuk memerintah. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat itu sendiri. Cara pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>7</sup> Demokrasi memiliki arti yang universal, di antaranya:

Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Pada

---

<sup>5</sup> Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, Hal 34-35

<sup>6</sup> Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004, Hal. 12

<sup>7</sup> Zuhairi Banu, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Medan: Bina Media

pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi.<sup>8</sup>

Menurut J. W. Garner, demokrasi adalah pemerintahan yang mirip kepada perwakilan, dimana pegawai-pegawai serta agen-agen pemerintahan dipilih oleh pemilih secara langsung dan melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak pemilihnya.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*).

Sementara Robert A. Dahl,<sup>9</sup> mengatakan demokrasi adalah suatu sistem politik yang memberi<sup>o</sup> peluang kepada rakyat untuk membuat keputusan-keputusan secara umum, dan menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasar demokrasi. Responsifitas semacam itu mensyaratkan warga negara memiliki kesempatan untuk: *pertama* merumuskan preferensinya (pilihan), *kedua* menunjukkan preferensinya kepada warga-warga lain dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif, dan *ketiga* memberikan bobot yang sama pada preferensinya yang dilakukan oleh warga negara. Ketiga kesempatan ini pada gilirannya tergantung pada

---

<sup>8</sup> George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Hal. 14

sejumlah jaminan kelembagaan yang juga merupakan indikator dari demokrasi, yaitu:

1. Kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah mengenai kebijakan yang ditetapkan sesuai konstitusi dalam pemilihan pejabat-pejabat.
2. Pejabat-pejabat terpilih, dipilih dan diganti dengan frekuensi yang relatif sering, adil dan dengan pemilihan bebas.
3. Warga negara memberikan suaranya dalam pemilihan umum
4. Warga negara memiliki kesempatan atau hak untuk memasuki jabatan-jabatan publik dengan pencalonan-pencalonan pada pemilihan umum.
5. Warga negara memiliki hak untuk mengemukakan kebebasan berekspresinya, terutama kebebasan berekspresi secara politik.
6. Warga negara memiliki akses terhadap sumber alternatif atas informasi yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lainnya.
7. Warga negara memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dalam perkumpulan yang otonom, termasuk perkumpulan politik, seperti partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang mempengaruhi pemerintah dengan cara berkompetisi dalam pemilu, dan dengan cara-cara yang damai.

Pemahaman tentang demokrasi dalam ilmu politik terdiri dari dua macam, yaitu demokrasi secara normatif dan demokrasi secara empirik.

Demokrasi normatif adalah demokrasi yang hendak dilakukan oleh negara, sesuai dengan ungkapan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>10</sup>

Sementara demokrasi dalam artian empirik adalah demokrasi yang ditemukan atau dipraktikkan dalam kehidupan politik nyata, yaitu pemberian ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakat untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada. Disamping itu warga masyarakat diperkenankan untuk mengamati sejauh mana kompetisi antara para pemimpin yang dilakukan secara teratur untuk mengisi jabatan politik. Hal ini untuk menghindari kemungkinan seseorang memperoleh jabatan politik secara terus-menerus tanpa ada pembatasan yang tentunya dapat membawa bahaya bagi demokrasi.<sup>11</sup> Adapun karakteristik demokrasi secara empirik adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Pemilihan umum
2. Terlaksananya prinsip *check and balances*
3. Sirkulasi kekuasaan yang objektif dan terbuka
4. Adanya partai politik yang demokratis
5. Menikmati hak-hak dasar
6. Persamaan dihadapan hukum
7. Akuntabilitas pejabat

---

<sup>10</sup> Zakaria Bangun, *op.cit.*, Hal. 10

<sup>11</sup> Koirudin, *op.cit.*, Hal. 142

<sup>12</sup> Zakaria Bangun, *op.cit.*, Hal. 11-14

Demokrasi atau tidaknya suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi, dapat dilihat dengan memberi tolak ukur terhadap adanya elemen–elemen demokrasi di dalamnya. Walaupun setiap negara berbeda–beda dalam cara pandang maupun pengertiannya terhadap demokrasi, namun secara umum elemen–elemen demokrasi adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai–partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan.
2. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan.
3. Tingkat kebebasan politik dan sipil dalam kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi, yaitu untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Ketika demokrasi diartikan sebagai kompetisi, partisipasi dan kebebasan, maka jelas bahwa proses demokratisasi merupakan perubahan sistem politik dari bentuk nondemokrasi ke bentuk yang lebih demokratis, dan dapat terjadi dengan berbagai cara. Dalam hal ini, Robert Dahl mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi, yaitu jalan yang

terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi. Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Rezim nondemokratis mungkin saja menjauhkan sebagian besar masyarakat dari partisipasi. Pada rezim demokratis, seluruh penduduk dewasa memperoleh hak dan kebebasan secara penuh.<sup>14</sup>

Pemerintahan demokrasi dapat berjalan stabil jika memiliki kondisi-kondisi sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Para pemimpin tidak menggunakan koersi kekerasan, yaitu polisi dan militer dalam meraih dan mempertahankan kekuasaannya.
2. Adanya organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis.
3. Potensi konflik dan pluralisme struktural dipertahankan pada tingkat yang masih dapat ditoleransi.
4. Dalam masyarakat, khususnya yang aktif dalam politik, ada budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki (demokrasi politik).

Untuk mencapai kondisi demokrasi yang stabil dalam suatu negara, diperlukan suatu pemerintahan yang kuat, ciri-cirinya adalah:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal.21

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal. 94

<sup>16</sup> Fransiska Kurlinawati, "Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan", Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

1. Memiliki birokrasi yang efisien dan tidak korupsi.
2. Memiliki elit politik yang berkemauan dan mampu memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi.
3. Memiliki kebijakan yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan.

Demokrasi memiliki dua dimensi dasar yang saling berkaitan, yaitu: pertama tersedianya peluang persaingan bebas dan terbuka untuk mendapatkan semua kedudukan dan kekuasaan politik. Kedua, terdapat jaminan bagi partisipasi politik seluruh warga negara. Oleh karena itu yang menjadi inti demokrasi adalah pemilihan yang bersifat umum, bebas dan setara. Atas dasar prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Robert Dahl, maka yang terjadi adalah keunggulan demokrasi, yaitu mendorong warga masyarakat untuk berinisiatif dan kreatif untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan politik sesuai dengan hukum yang berlaku dalam negara tersebut.<sup>17</sup>

Sistem pemerintahan demokrasi memiliki beberapa hal pokok yang menjadi keunggulan dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lain, yaitu:<sup>18</sup>

1. Demokrasi membantu dalam mencegah timbulnya



2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan, dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya dari pada alternatif lain yang memungkinkan.
4. Demokrasi melindungi orang-orang yang berkaitan dengan kepentingan pokok mereka. Misalnya kelangsungan hidup, cinta, tempat bernaung, rasa hormat, pakaian, kebebasan memilih, memiliki keyakinan dan lain-lain.
5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup dibawah hukum yang mereka pilih sendiri.
6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih dari pada alternatif lain yang memungkinkan.
8. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
9. Negara-negara demokrasi modern tidak bermerang satu sama

10. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur dari pada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

## **E.2. Demokratisasi**

Demokratisasi adalah suatu penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan, sehingga diharapkan dapat tercapai sistem pemerintahan yang demokratis atau terbentuknya kehidupan politik yang lebih demokrasi. Demokratisasi biasanya melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Penggantian dari penguasa non demokrasi ke penguasa demokrasi.
2. Pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi.
3. Konsolidasi demokrasi.
4. Politik demokrasi sebagai budaya bernegara.

Demokratisasi menurut BJ. Habibie adalah suatu perubahan, baik itu perlahan maupaun secara cepat kearah demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Jika demokratisasi tidak dilakukan, maka bayaran yang harus diterima adalah balkanisasi, perang saudara yang menumpahkan darah, dan kemunduran ekonomi dengan sangat parah.

Menurut Maswadi Rauf, demokratisasi adalah suatu proses tanpa

namun perlu proses yang panjang. Demokratisasi adalah proses yang tidak pernah selesai sampai kapanpun juga. Demokratisasi bertujuan untuk menegakkan semakin banyak nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik.<sup>19</sup>

Demokratisasi memiliki dua aspek, yaitu transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi. Transisi demokrasi adalah titik awal proses perubahan dari rezim otoritarian menuju rezim demokratis. Transisi demokrasi dimulai dari keruntuhan rezim otoritarian lama, yang kemudian diikuti atau berakhir dengan pengesahan lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru dibawah payung demokrasi. Selanjutnya proses konsolidasi demokrasi mencakup peningkatan secara prinsipil komitmen seluruh elemen masyarakat pada aturan main demokrasi. Konsolidasi demokrasi juga dipahami sebagai sebuah proses panjang yang mengurangi kemungkinan pembalikan demokratisasi, mencegah erosi demokrasi, menghindari keruntuhan demokrasi, yang diteruskan dengan melengkap demokrasi, pendalaman demokrasi dan mengorganisir demokrasi secara berkelanjutan.<sup>20</sup>

Masing-masing tahapan diatas tidak bisa dipisahkan, karena merupakan kelanjutan antara satu tahap dengan tahap yang lain. Karena itu, biasanya tahap transisi demokrasi mensyaratkan diskontinuitas dengan

---

<sup>19</sup> Maswadi Rauf, "Demokrasi dan Demokratisasi: Penjajakan Teoritis untuk Indonesia" dalam *Menimbang Masa Depan Orde Baru*, Seri Penerbitan Studi Politik, Jakarta: Lab Politik FISIP UI-Mizan, 1998, Hal, 24-25

<sup>20</sup> Hamdan Basyar dan Fredy BL. Tobing, *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan*

tahap otoriter-totaliter yang anti demokrasi, sedangkan tahap sistem otentik demokrasi mensyaratkan kontinuitas dengan transisi demokrasi.<sup>21</sup>

### E.3. Oligarki

Oligarki berasal adari bahasa Yunani, yaitu “*oligarkhia*” yang terdiri dari kata *oligoi* yang berarti sekelompok kecil dan *arkhein* yang berarti memerintah. Dari dua kata tersebut maka oligarki dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politiknya dikendalikan oleh segelintir golongan atau sekelompok kecil (minoritas) anggota masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Aristoteles, oligarki merupakan bentuk pemerintahan oleh segelintir orang yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri.<sup>23</sup> Sementara itu sosiolog Jerman Robert Michels mengajukan postulat yang dirumuskan dalam pemikirannya dengan sebutan *Iron Law Oligarchies*, atau dalam bahasa Indonesia berarti Hukum Besi Oligarki. Robert Michels meletakkan pengertian oligarki lebih pada aspek sejumlah kecil yang memerintah atau dominasi elite atas organisasi yang kompleks. Menurutnya, organisasi partai merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membuat kemauan kolektif. Setiap organisasi, terutama

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Ade Reza Haryadi, *Politik Oligarki; Pengalaman Indonesia*, diakses tanggal 16 Desember 2013, dari: [http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=1207#\\_ftnref5](http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=1207#_ftnref5)

<sup>23</sup> Daniel Hutagalung, *Oligarki: Kangker dalam Rahim Demokrasi*, diakses tanggal 16 Desember 2013, dari: <http://www.fikiranindonesia.com/2013/11/28/artikel/detail?id=26>

kepartaian mewakili kekuatan oligarkis yang didasarkan atas basis demokratis.<sup>24</sup>

Dalam organisasi, secara alamiah kekuasaan akan jatuh ketangan sejumlah kecil pimpinan, mendorongnya jadi birokratis, dan terkadang konservatif. Kekuasaan oligarkis yang terbentuk di dalam organisasi seperti partai politik akan terbawa kedalam pemerintahan, tak peduli apakah partai tersebut berkuasa melalui pemilihan umum yang demokratis atau melalui jalur revolusi sekalipun.<sup>25</sup>

Sejalan dengan apa yang dikatakan Robert Michels, Gaetano Mosca juga mengatakan bahwa tidak akan ada masyarakat tanpa suatu kelas yang dominan. Tidak mungkin ada suatu tata susunan sosial yang berkembang demikian tinggi tanpa suatu kelas politik, yaitu kelas yang secara politik dominan selaku kelas minoritas. Dalam kaitannya dengan demokrasi, perjuangan abadi antara aristokrasi dan demokrasi tidak pernah lebih dari perjuangan antara minoritas lama yang mempertahankan dominasinya, dan minoritas baru yang ambigius bermaksud memenangkan kekuasaan dengan cara bersatu dengan yang pertama, atau menumbangkan dan menggantikan kedudukannya. Jadi, perjuangan kelas hanya terdiri dari perjuangan antar minoritas yang berturut-turut dominan. Hal ini dapat dilihat pada waktu-waktu dimana pergantian elit dilakukan secara terbatas dalam kelas sosial yang besar, dan dilakukan dalam bidang politik.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ade Reza Haryadi, *loc.cit.*

<sup>25</sup> Daniel Hutagalung, *loc.cit.*

<sup>26</sup> Robert Michels, *Teori Politik Komunisme*, Ginebra: Librairie Payot, 1929, hal. 101.

Berdasarkan pandangan ini, organisasi pemerintah atau negara dan partai politik tidak lain adalah milik sekelompok kecil orang. Sasaran golongan minoritas ini adalah memaksakan suatu tatanan legal kepada seluruh masyarakat sebagai hasil dominansi dan eksploitasi terhadap massa. Kelas minoritas ini tidak pernah benar-benar mewakili mayoritas. Jadi, golongan mayoritas selamanya tidak akan mampu memerintah dirinya sendiri. Sekalipun pada suatu saat ketidak puasan massa yang memuncak dapat melemparkan kaum borjuis dari kekuasaan. Hal itu hanya akan memunculkan golongan minoritas baru dalam barisan kelas penguasa. Dengan demikian, mayoritas manusia berada dalam suasana pengawasan yang terus-menerus untuk selalu tunduk pada sejumlah kecil minoritas, dan harus puas bertumpu dengan apa yang disebut dengan oligarki.<sup>27</sup>

Bahaya fenomena oligarkis ini terjadi juga pada partai-partai revolusioner, yang secara asal mula dan programnya menolak setiap kecenderungan terhadap oligarkis yang biasanya muncul dari oposisi terhadap oligarki. Maka, munculnya fenomena oligarkis di dalam tubuh partai-partai revolusioner merupakan bukti penting dari eksistensi kecenderungan oligarkis yang benar-benar ada di dalam setiap bentuk organisasi manusia, yang memperjuangkan tercapainya tujuan-tujuan tertentu.<sup>28</sup>

Dengan demikian, revolusi sosial tidak akan dapat membawa perubahan nyata bagi struktur internal massa. Kaum sosialis bisa saja memperoleh kemenangan, tetapi tidak demikian dengan halnya sosialisme, yang akan segera binasa begitu pengikut-pengikutnya tampil sebagai pemenang. Proses ini dapat dikatakan sebagai *tragikomedi*, yaitu ketika massa merasa puas mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempengaruhi pergantian penguasa atau pemerintah. Yang tersisa pada usaha tersebut hanyalah kehormatan (kehormatan untuk direkrut kedalam pemerintahan). Dari perekrutan tersebut, bukan tidak mungkin justru yang terjadi adalah golongan minoritas baru dalam barisan kelas penguasaan. Oleh karena itu, bagaimanapun kuatnya gerakan rakyat, belum tentu mampu menciptakan perubahan yang mendalam dan permanen dalam organisasi sosial dunia yang beradab.<sup>29</sup>

Oligarki muncul sebagai kebutuhan teknis yang mendesak akan kepemimpinan. Fenomena oligarki juga sebagai dampak dari transformasi psikis yang dialami oleh pemimpin-pemimpin partai sepanjang hidup mereka. Oligarki juga tergantung kepada apa yang dikatakan sebagai "psikologi organisasi itu sendiri", yakni pada kebutuhan-kebutuhan taktis dan teknis yang berasal dari konsolidasi setiap kesatuan politik yang berdisiplin. Dalam arti yang lebih padat, hukum dasar sosiologi dari organisasi partai-partai politik yang merupakan inti sari dari Hukum Besi Oligarki yang dikemukakan Robert Michels ialah sebagai berikut:

*“Organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat, dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi, maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki”*<sup>30</sup>

Ketika sebuah partai politik sudah terikat Hukum Besi Oligarki, maka ia bukan lagi patuh kepada konstituennya, melainkan patuh pada pemberi sokongan besar. Inilah pengaruh berbahaya bagi partai politik yang tidak memiliki kekuatan. Pada akhirnya partai politik hanya akan dijadikan alat kaum oligarkis partai untuk mempertahankan atau mewujudkan kepentingan mereka dan meninggalkan aspirasi rakyat dibelakangnya.

Dalam analisis yang lebih mendalam, Jeffrey A. Winters membagi oligarki dalam berbagai tipe. Menurutny ada empat tipe oligarki, yaitu:<sup>31</sup>

1. Oligarki Panglima (*Warring Oligarchy*), yaitu bentuk oligarki yang sangat ekstrim dan penuh konflik sesama kaum oligarkis. Masing-masing oligark (pelaku oligarki) bersaing satu sama lain dengan menggunakan instrumen kekuasaan dan pemaksaan ketika muncul ancaman dari lawan. Jarang ada oligarki yang muncul sebagai aktor superior atau mendominasi. Dalam waktu singkat bisa terjadi perubahan karena tidak ada persekutuan yang stabil di sini.

---

<sup>30</sup> Robert Michels, *op.cit.*, Hal. xxvii

<sup>31</sup> Grady, *Konsep Dasar Oligarki*, diakses tanggal 16 Desember 2013, dari: <http://www.konsep-dasar-oligarki.html>



2. Oligarki Penguasa Kolektif (*Ruling Oligarchy*), yaitu bentuk oligarki dimana para oligark berkuasa secara kolektif dan melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Oligarki ini sangat berbeda dengan oligarki panglima. Ketika peran pribadi oligark pada oligarki panglima berlangsung dalam bentuk kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan yang lebih besar, oligarki penguasa kolektif melakukan peran pribadi lebih kecil dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam oligarki penguasa kolektif, oligark masih memainkan peranan langsung dalam melindungi kekuasaan dan memerintah komunitas atau masyarakat. Oligarki tipe ini bisa mengembangkan kerjasama dengan oligark lainnya untuk menciptakan stabilitas melalui seperangkat aturan bersama yang dirumuskan dan dijalankan oleh komite bersama.
3. Oligarki Sultanistik (*Sultanistic Oligarchy*), pada oligarki ini terjadi monopoli sarana pemaksaan berada di tangan satu oligark dan bukan pada negara yang dibatasi hukum. Pada negara monarki, seorang raja atau sultan memiliki potensi dalam menguasai sarana pemaksaan, dapat berperan sebagai diktator dan memiliki kekuasaan yang hampir tidak terbatas. Menguasai kekayaan dan sulit untuk dipecahkan.
4. Oligarki sipil, yaitu bentuk oligarki dimana kebersamaan kaum oligarkis saling berbagi dengan sesamanya tanpa ada monopoli

oleh satu pihak. Para oligark kali ini tidak lagi bereperan langsung dalam praktek-praktek kekerasan. Dalam oligarki bentuk ini, dimungkinkan tunduknya kaum oligarkis kepada satu sistem hukum yang mengatur mereka. Para oligark menyerahkan sebagian kekuasaanya kepada pemerintah, dimana hukum lebih kuat daripada semua individu, dan semua oligark sama-sama diikat oleh hukum yang sama. Oligarki bentuk ini memanfaatkan negara sebagai penjaganya dari serangan-serangan lateral antar oligarki. Perlu diketahui juga bahwa bentuk oligarki sipil tidak dapat bertahan tanpa adanya sistem hukum yang kuat.

Sistem oligarki berbeda dengan sistem demokrasi, perbedaan tersebut terletak pada jumlah pemegang kekuasaan atau pemerintahan. Oligark sebagai satu-satunya golongan warga negara dalam demokrasi liberal yang dapat mengejar tujuan politik pribadi. Dengan mempertahankan kekuasaan melalui kekayaan, posisi oligark semakin kuat dan kekuasaan oligarkis sulit dan cenderung tidak dapat dipecahkan, walaupun masih mempunyai ruang untuk di singkirkan namun kemudian akan muncul kembali bentuk-bentuk oligarki baru, seperti halnya hanya oleh masyarakat golongan minoritas baru dalam horizon kelas

#### **E.4. Partai Politik**

Partai Politik pada awalnya lahir di negara–negara eropa barat pada abad pertengahan. Kemudian berkembang dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah dipihak lain.<sup>33</sup> Partai politik pada umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern, atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di negara–negara berkembangpun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai.

Berdasarkan aspek kesejarahannya, asal mula partai politik muncul dengan dua karakter yaitu, pertama, partai politik yang lahir dari dalam parlemen. Kedua, partai politik yang lahir dari luar parlemen. Teori–teori asal usul partai politik adalah:

1. Kelembagaan yang melihat hubungan parlemen awal dan timbulnya partai politik.
2. Situasi historis yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis.
3. Pelembagaan yang melihat timbulnya partai politik sebagai produk modernisasi.

Teori partai politik itu sendiri secara umum merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program atau kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>34</sup> Secara modern, partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.<sup>35</sup>

Berikut ini teori-teori partai politik menurut para ahli:

1. Mark N. Hangopian, mendefinsikan partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik, dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.<sup>36</sup>
2. Sigmund Neumann, mendefinisi partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan, serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hal. 403-404

<sup>35</sup> Lihat kata pengantar dari Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Edisi Kedua*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012, Hal. xv

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

3. Sigit Pamungkas, mendefinisikan partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan, dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum.<sup>38</sup>
4. Koirudin, berpendapat bahwa partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada persoalan kekuasaan pemerintah, dan bersaing guna memperoleh dukungan rakyat untuk menempati kantung-kantung kekuasaan politik.<sup>39</sup>
4. Menurut UU Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan melihat gambaran mengenai partai politik diatas, maka sarana untuk aspirasi rakyat kepada pemerintah tentunya melalui partai politik. Akan tetapi perlu dimengerti, bahwa partai politik itu merupakan

---

<sup>38</sup> Sigit Pamungkas, *Partai Politik, Teori dan Praktek di Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Institute Democracy and Welfarism, 2012, Hal 5

<sup>39</sup> Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik Era*

organisasi yang ada dalam suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, dengan cara menempatkan para wakilnya untuk duduk dalam lembaga tinggi negara (pemerintah) maupun lembaga tertinggi negara.

Selayaknya sebuah struktur dalam sistem politik, partai politik memiliki sejumlah fungsi politik. Fungsi-fungsi tersebut adalah representasi (perwakilan), dengan konversi dan agregasi; integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan kebijaksanaan, serta kontrol terhadap pemerintah.<sup>40</sup>

Adapun fungsi partai politik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia dan

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik merupakan ruh dari sistem demokrasi, karena keberadaan partai politik dan sistem kepartaian yang dibangun merupakan barometer demokrasi tidaknya sebuah sistem politik dalam sebuah negara. Politik demokratis ditandai dengan adanya politik kepartaian yang menempatkan partai politik sebagai aktor utama yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah.

Dalam konteks demokrasi, maka harapan terwujudnya demokrasi adalah, bahwa partai benar-benar menjadi saluran dasar dari masyarakat untuk menuju kebijakan publik. Produk kebijakan yang dihasilkan tentu saja harus melalui proses yang demokratis. Oleh karena itu, tentu saja partai politik yang merupakan unsur yang terlibat dalam prosesnya tersebut haruslah merupakan partai politik yang demokratis.

Empat konsep tentang idealitas terjauh dari partai politik dalam hal manajerial partai menuju demokrasi, dilihat dari keberadaan partai politik yang ada di Indonesia sejak pemilu 1999 ialah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Dapat dikontrol oleh rakyat, yaitu partai yang dibentuk bukan dari kalangan parlemen melainkan dari kalangan masyarakat sebagai suatu gerakan rakyat, mempunyai basis lokal yang jelas dan kuat, dibentuk berdasarkan kepedulian yang sama atas isu

penting, segi keuangan tergantung kepada iuran dan kontribusi para anggota, dan terakhir para pengurus dan calon dari partai untuk anggota legislatif dan eksekutif dipilih secara langsung, terbuka dan kompetitif oleh para anggota.

2. Sistem kepartaian yang pluralis, yaitu perlu ada dan dikembangkan sistem kepartaian yang dipandang cocok dan sesuai dengan kemajemukan masyarakat Indonesia, tetapi dipihak lain dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif.
3. Visi demokrasi pimpinan partai, yaitu partai politik hendaknya dikelola oleh para pemimpin dan aktivis yang memahami demokrasi. Visi demokrasi tersebut merupakan upaya untuk memanusiakan kekuasaan, dan bukan sekedar kompetisi tetapi juga kompetensi. Mereka adalah pengelola partai politik yang harus memiliki prinsip-prinsip: pertama, tidak bertindak dengan pragmatisme yang berdampingan dengan sektarianisme, melainkan dengan visi dan misi memanusiakan penggunaan kekuasaan. Kedua, bertindak dengan moralitas publik yang jelas, sehingga dengan tegas menolak praktik KKN. Ketiga, bersedia menjadi sarana pencerah masyarakat.
4. Partai politik tidak mengedepankan monopoli dalam hal:
  - a. Posisi dalam kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga negara lainnya)



- b. Informasi yang urgen untuk diketahui oleh publik dan bertindak transparan kepada publik dengan membuka akses kepada publik seluas mungkin untuk berinteraksi dengan partai politik.
- c. Partai bersedia berdialog dengan masyarakat untuk menyepakati apa yang menjadi kepentingan bersama.

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai.<sup>42</sup>

Partai dibentuk sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, karena telah menjadi tujuan dan dengan target serta kepentingannya sendiri, namun dari sudut pandang teleologis partai dapat terpisah dari kelas yang diwakilinya. Menurut hukum sosial yang dapat diterapkan secara universal, setiap organ kolektif yang dibentuk pasti akan menciptakan kepentingan-kepentingannya sendiri begitu organ tersebut mengalami konsolidasi. Eksistensi kepentingan-kepentingan yang khusus ini menimbulkan konflik dengan kepentingan-kepentingan kolektif. Selanjutnya akan timbul keinginan untuk menciptakan organ-organ yang

baik yang khusus maupun yang kolektif. Akibatnya, dalam jangka panjang mereka cenderung mengalami transformasi menjadi kelas-kelas terpisah. Dan pada tahap selanjutnya, mereka cenderung berubah menjadi kelas-kelas yang berbeda-beda.<sup>43</sup>

Fenomena sosiologis tersebut, menjadi titik rawan bagi demokrasi yang tidak bisa dikonsepsikan tanpa organisasi kepartaian untuk diserang oleh lawan-lawan ilmiah demokrasi, seperti oligarki, aristokrasi, monarki, otoritarian dan lain sebagainya.<sup>44</sup> Hal ini sebagaimana yang dikatakan Robert Michels tentang organisasi. Organisasi sulit melepaskan diri dari hukum besi oligarki. Bahwa berbicara tentang organisasi maka sebenarnya berbicara tentang oligarki. Organisasi adalah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat, dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi kekuasaan.

Setiap organisasi kepartaian mewakili kekuatan oligarkis yang didasarkan atas basis demokratis. Dimana-mana kita menemukan pemilih dan yang dipilih. Dimana-mana kita juga menemui kekuasaan para pemimpin yang dipilih atas massa pemilih hampir tidak terbatas. Dengan demikian struktur oligarkis telah menyedot prinsip-prinsip dasar demokrasi. Padahal, keinginan kaum sosialis yang sebenarnya adalah para elit politik baru akan lebih baik ketimbang yang lama.<sup>45</sup>

Namun demikian, dari apa yang dikemukakan Robert Michels mengenai hukum besi oligarki pada organisasi, ia juga menulis bahwa demokrasi yang tidak bisa dikonsepsikan tanpa organisasi, maka demokrasi memerlukan usaha yang tidak kenal lelah untuk melakukan pekerjaan yang akan memberi hasil yang baik dalam pengertian demokrasi. Pada hakekatnya ialah ciri-ciri umum demokrasi.<sup>46</sup> Gerakan yang benar-benar didorong oleh semangat demokrasi mungkin memiliki nilai tertentu yang berperan untuk melemahkan kecenderungan oligarki. Dalam hal ini diibaratkan pada suatu dongeng, seorang petani yang tergeletak sekarat mengatakan kepada anak-anaknya bahwa ada harta karun yang terpendam diladangnya. Setelah kematian petani itu, anak-anaknya mulai menggali-gali seluruh ladang tersebut untuk menemukan harta karun tersebut. Tetapi mereka tidak menemukannya. Walaupun demikian, kerja tanpa lelah itu sangat baik untuk tanah ladang, karena hasil ladang ternyata menjadikan mereka cukup sejahtera. Harta karun dalam dongeng itu dapat dengan baik menyimbolkan demokrasi. Demokrasi bagaikan "harta karun" yang tidak akan ditemukan walaupun dicari dimana-mana. Akan tetapi, dalam pencarian dan usaha tanpa lelah untuk menemukan apa yang tidak dapat ditemukan, kita akan melaksanakan pekerjaan yang akan membuahkan hasil berlimpah-limpah dalam arti kata demokrasi.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Robert Michels, *Partai Politik Komunis dan Oligarki dalam Birokrasi*, Jakarta: CV

Dari penjelasan tersebut, maka sudah seharusnya kita menganggap penting segala bentuk usaha kearah pembatasan yang mungkin diarahkan kepada kekuasaan oligarki atas (negara, kelas dominan, partai dan sebagainya) karena demokrasi memiliki bahaya akan kecenderungan terhadap oligarki. Jika usaha-usaha dan pekerjaan terhadap pembatasan kearah oligarki tersebut berhasil dilakukan, maka proses demokratisasi yang tidak kenal lelah tersebut paling tidak akan menemukan hasil yang baik yang mengarah kepada demokrasi, karena demokrasi juga memungkinkan akan membatasi bahaya kecenderungan oligarki seminimal mungkin, sekalipun tidak mungkin dicegah sama sekali.<sup>48</sup>

Oleh karena itu kehidupan partai politik dalam teori dan praktik perlu memperlihatkan kecenderungan yang lebih demokratis untuk mendukung kesuksesan demokrasi. Proses demokratis yang dijalankan oleh partai politik adalah bukti bahwa partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, benar-benar menjalankan hakekatnya untuk menciptakan iklim politik dan pemerintahan yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **E.5. Kepemimpinan**

Kepemimpinan dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai proses mengendalikan, membimbing, mengarahkan, dan mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain, termasuk juga para anggota dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka

Sebagaimana didefinisikan oleh Stoner Freeman dan Gilbert, kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan.<sup>49</sup> Lebih jauh lagi, Griffin membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep,<sup>50</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai Proses

Kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses dimana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi.

2. Sebagai Atribut

Kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan fisik, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka.

---

<sup>49</sup> Stoner Freeman dan Gibbert JR., *Manajemen*. Jilid I Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta:Prehallindo, 1996

<sup>50</sup> Griffin, "The Two Faces of Leadership", *Harvard Business Review*, Desember 1997, hal. 68-76

Selain pengertian kepemimpinan tersebut, pendapat para ahli lainnya mengenai kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. Pockell, mengutip dari perkataan seorang filsuf bernama *Sun Tzu*, mendefinisikan kepemimpinan adalah soal kecerdasan, bisa dipercaya, kemanusiawian, keberanian dan disiplin. Namun hanya mengandalkan pada kecerdasan akan menghasilkan pemberontakan. Hanya menerapkan kemanusiawian akan menghasilkan kelemahan, semetara sekedar percaya akan menghasilkan ketololan. Adapun ketergantungan pada keberanian akan menghasilkan kekerasan. Dan disiplin berlebihan serta penerapan perintah keras akan menghasilkan kekejaman. Jadi, jika seseorang bisa memiliki semua dari lima kebajikan diatas secara bersama-sama, masing-masing tepat sesuai fungsinya, barulah ia bisa menjadi pemimpin.<sup>51</sup>
2. Sarros dan Butchatsky mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktifitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Pockell dalam Hamdan Basyar dan Fredy BL. Tobing, *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hal. 64-65

<sup>52</sup> Didik Supriyanto, (28 Desember 2010), *Tipologi Kepemimpinan*, diakses tanggal 4 Desember 2010

3. Miftah Toha mengartikan kepemimpinan sebagai kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, asalakan seseorang dapat menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu.<sup>53</sup>

Berdasarkan berbagai definisi kepemimpinan tersebut, maka kepemimpinan memiliki beberapa implikasi, yaitu: pertama, kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, tanpa adanya bawahan tidak akan ada pimpinan. Kedua, seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi. Ketiga, kepemimpinan harus memiliki karakter dasar dan *basic values*.

Dalam perspektif agama Islam, disebutkan adanya empat sifat/karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin, sebagaimana dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni *sidiq* (benar/ jujur), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (komunikator), dan *fathanah* (cerdas). Sifat-sifat tersebut, selaras dengan prinsip-prinsip kepemimpinan modern, dimana setiap pemimpin harus memiliki visi, dimana seorang pemimpin adalah manusia pembelajar, memiliki ide-ide besar yang visioner dan menjadi

referensi utama bagi yang dipimpin. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan (*ability*) dan kapasitas (*capacity*), antara lain: keahlian/kecakapan (*skill*) dalam berkomunikasi, memotivasi; berwawasan luas (*knowledge*); pengalaman (*experience*); kemampuan mengembangkan pengaruh (*influence*); kemampuan menggalang solidaritas (*Solidarity maker*); serta kemampuan memecahkan masalah (*decision making*). Seorang pemimpin juga harus memiliki integritas (*integrity*), yakni memiliki kepribadian yang utuh/berwibawa (berkharisma); bijaksana (*wisdom*); bersikap empatik; memiliki prinsip-prinsip yang utama dalam hidupnya; menjadi panutan (kelompok referensi utama); serta mampu mengutamakan kepentingan yang lebih besar (bangsa dan negara), ketimbang kepentingan kecil dan sempit (pribadi dan kelompok).<sup>54</sup>

Dalam proses untuk menjadi pemimpin ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang bisa menjadi pemimpin. Masing-masing faktor berbeda tergantung pada karakteristik kelompok yang dipimpinnya, dan tujuan kelompok itu sendiri. Secara garis besar menurut William Foote Whyte ada empat faktor yang menentukan seseorang dapat menjadi pemimpin,<sup>55</sup> yaitu:

1. *Operational leadership*, yaitu orang yang memiliki paling banyak inisiatif, menarik, dinamis, dapat menunjukkan prestasi

---

<sup>54</sup> Akbar Tandjung, (24 Januari 2013), *Kepemimpinan Politik Yang Negarawan*, diakses tanggal 24 Januari 2013, dari:

[Http://www.Setneg.Go.Id/Index2.Php?Option=Com\\_Content&Do\\_Pdf=1&Id=728](http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=728)

<sup>55</sup> Whyte, F. O., *Manajemen dan Organisasi*, Jakarta: PT. Pustaka Cinta, 1991



kerja dalam kelompoknya, dan memiliki pengabdian yang tulus terhadap organisasi.

2. *Popularity*, yaitu orang yang paling banyak dikenal mempunyai kesempatan untuk menjadi pimpinan.
3. *The assumed representative*, yaitu orang yang dapat mewakili kelompoknya, mempunyai kesempatan besar untuk menjadi pemimpin.
4. *The prominent talent*, yaitu orang yang mempunyai bakat kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin.

Kepemimpinan memiliki tipe-tipe yang dapat diklasifikasikan. Menurut Max Weber, kepemimpinan terbagi menjadi lima tipe, yakni tipe tradisional, kharismatik, legalistik, *entrepreneurial* dan teknokratik. Analisis Max Weber mengenai kelima tipe kepemimpinan tersebut berawal dari penguasa yang *legitimate*, yakni prinsip yang dipakai untuk menjustifikasi hak pemimpin politik untuk mengatur kewajiban pengikutnya untuk mematuhi pemimpinnya tersebut. Aturan menjadi *legitimate* ketika pengikut melaksanakan perintah pemimpin mereka, karena mereka menerima hak pemimpin tersebut untuk memberikan perintah. Sedangkan pemimpin kharismatik dan politisi *entrepreneurial* memainkan peranan terbesar dalam gerakan revolusioner. Dan pemimpin

tradisional, legalistik dan teknokratik biasanya mengidentifikasi mereka sebagai pemerintah yang mapan.<sup>56</sup>

Dalam konteks model kepemimpinan, dikenal dua model kepemimpinan, yakni, pertama, model kepemimpinan *transformasional*, yakni kepemimpinan yang mampu membawa organisasi kepada perubahan-perubahan dalam visi, strategi, dan budaya organisasi (kepemimpinan yang dinamis dan produktif). Kedua, model kepemimpinan *transaksional*, yakni kepemimpinan yang cenderung mempertahankan kestabilan dan status *quo* dalam organisasi, ketimbang mempromosikan perubahan.

Dalam konteks politik, ada kriteria ideal kepemimpinan yang harus dipenuhi oleh seorang politisi yang menjadi pemimpin politik. Kriteria tersebut seperti yang dikemukakan oleh Akbar Tandjung adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Mampu memberi contoh dan mendorong suatu proses pendidikan dan pencerahan politik.
2. Pemimpin dituntut untuk mampu mempertahankan konstituen politik dengan baik, bahkan dituntut untuk mampu memunculkan dukungan-dukungan politik yang signifikan.
3. Mampu mengelola potensi konflik yang ada dengan baik dan efektif.

---

<sup>56</sup> Koirudin, *op.cit.*, Hal 133

<sup>57</sup> Akbar Tandjung, *loc.cit.*

4. Mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan berbagai segmen.
5. Mampu memotivasi anak buah dan konstituennya dengan baik.
6. Mampu menempatkan orang-orangnya pada posisi-posisi strategis di lembaga-lembaga kenegaraan yang ada, dan
7. Mampu menghadirkan proses *sirkulasi elite* di dalam organisasi secara sehat.

Sementara Koirudin dalam bukunya, mengatakan bahwa karakteristik dan tipe kepemimpinan yang ideal bagi partai politik, untuk menuju pranata demokrasi yang lebih baik adalah sebagai berikut.<sup>58</sup>

1. Pemimpin yang mempunyai tipe demokratik, yaitu sebuah tipe pemimpin yang memandang perannya selaku pemimpin organisasi adalah sebagai organisator, integrator dan bergerak sebagai suatu totalitas.
2. Menggunakan pendekatan holistik dan integralistik dalam menjalankan kepemimpinan politiknya di dalam partai.
3. Sangat menghargai harkat dan martabat kemanusiaan, dan mau mendengarkan masukan dari manapun datangnya.
4. Pemimpin yang demokratis dalam pengambilan keputusan mampu membawa partainya untuk menggunakan sistem desentralisasi bukan sentralisasi.

---

<sup>58</sup> Koirudin, *op.cit.*, Hal. 138

5. Dalam kepengurusan partai, pemimpin partai mengembangkan pola kolektif-kolegial.
6. Pemimpin partai harus mampu menjadi inspirator bagi partainya untuk selalu berada pada rel yang benar dalam penegakan nilai-nilai demokrasi.
7. Tidak menjadikan demokrasi sebagai jargon atau *platform* partai, namun bagaimana nilai-nilai demokrasi mampu diterapkan atau diimplemtasikan dalam parpol, dan dijadikan sebagai bahan untuk memperjuangkan permasalahan bangsa dan negara.

Dari kriteria dan tipe kepemimpinan diatas, menurut Koirudin jika berhasil diterapkan maka pemimpin yang semacam ini lebih bisa menjamin terlaksananya hak asasi individu-individu dan interaksinya dengan komunitas lain dalam wadah bangsa. Disamping itu, dengan menerapkan sistem desentralisasi dan menyebar serta partisipatif, dapat mendorong kepemimpinan yang mampu mengakomodasi aspirasi-aspirasi yang datang dari bawah (*bottom up*), dan menghindari pola-pola *top down* akan bermanfaat pada kemajuan sistem pemerintahan yang semakin demokratis, karena dapat menciptakan keseimbangan kekuasaan (*check and balances*).

## E.6. Regenerasi Kepemimpinan

Regenerasi kepemimpinan menjadi hal yang penting disamping pentingnya kepemimpinan didalam kehidupan manusia. Hal ini dimaksudkan untuk berlanjutnya kepemimpinan sebagai penerus kepemimpinan seterusnya. Regenerasi sering diartikan sebagai proses yang alamiah, atau suatu keniscayaan, dan sesuatu yang imperatif. Hal ini berarti secara biologis selalu akan muncul generasi baru, yaitu orang-orang muda yang tumbuh menjadi dewasa. Akan tetapi sesungguhnya pengertian tentang generasi bukan sekedar mengacu pada proses biologis. Pengertian generasi juga mencakup dimensi kemasyarakatan, atau mereka yang tergolong satu generasi bukan sekedar mereka yang seusia, akan tetapi mereka yang kecuali usia atau sekurun waktu, juga memiliki persepsi, sikap dan penghayatan yang sama tentang pokok-pokok persoalan kemasyarakatan.<sup>59</sup>

M.B. Zubakhrun mendefenisikan regenerasi selain merupakan sebuah proses alamiah atau sesuatu keniscayaan dan sesuatu yang imperatif, regenerasi juga bisa berarti memunculkan harapan-harapan baru yang memungkinkan untuk mendorong akan terjadinya perubahan yang lebih menjanjikan bagi kemajuan bangsa dan negara.<sup>60</sup>

Regenerasi kepemimpinan politik berlangsung di dalam satu tatanan politik yang jelas. Tatanan ini membutuhkan kontinuitas institusional. Namun kontinuitas ini mengandung pengertian terjadinya

---

<sup>59</sup> Lihat Salam Redaksi dalam "Regenerasi Kepemimpinan Nasional Menuju Kesejahteraan Bangsa", *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, No. 1979-3499, 5 Maret 2012, Hal. vi

<sup>60</sup> Lihat Wawancara Khusus, *ibid.* Hal. 2

pergeseran/penggantian pada tingkat personal, karena itu regenerasi kepemimpinan dapat berfungsi sebagai pemeliharaan sistem dan sebagai saluran bagi terjadinya perubahan.<sup>61</sup>

Regenerasi kepemimpinan didalam organisasi, khususnya partai politik berawal dari rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses yang menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Terdapat tiga proses rekrutmen politik dalam partai politik, yaitu:<sup>62</sup>

1. Seleksi, adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Biasanya dalam proses seleksi, terdapat berbagai hal yang mempengaruhi proses tersebut, yaitu meliputi aturan-aturan atau regulasi internal (AD/ART) parpol yang tentunya menyesuaikan dengan sistem kepartaian dan pemilu yang dianut dalam suatu pemerintahan yang demokratis.
2. Penominasian, adalah tahap yang meliputi ketersediaan calon atau pencalonan yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan.
3. Pemilihan, adalah tahap terakhir yang menentukan siapa calon yang memenangkan kompetisi melalui pemilihan.

Rekrutmen politik merupakan sebuah "*kebun rahasia politik*" yang menyimpan banyak misteri dan belum banyak yang terungkap. Oleh karena itu, pembahasan yang teliti terhadap fenomena rekrutmen politik

dapat menjelaskan banyak hal dari dinamika politik partai. Pertama, rekrutmen politik dapat menunjukkan kedudukan dari kekuasaan partai politik yang sesungguhnya. Apakah kekuasaan partai politik bersifat oligarki atau bersifat menyebar.

Kedua, rekrutmen politik dapat menggambarkan perjuangan atau pertarungan eksistensi individu dan faksi-faksi politik di dalam partai politik, sehingga nampak bagaimana sesungguhnya distribusi kekuasaan di dalam partai terjadi. Ketiga, rekrutmen politik dapat menunjukkan bagaimana representasi dalam partai politik dilakukan.

Keempat, rekrutmen politik menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Seperti yang dikatakan Pareto tentang sirkulasi elit, kita dapat mengetahui apakah sirkulasi elit itu mengacu pada proses dimana individu-individu berputar diantara elit dan non elit, atau mengacu pada proses dimana elit satu digantikan dengan elit yang lain.

Kelima, pasca rekrutmen politik, rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai diruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitas politiknya. Terakhir, rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian. Apakah partai tersebut merupakan partai kartel, partai kader atau partai massa dapat diketahui dengan melihat

1. Apakah rekrutmen politik dilakukan dari partai yang beranggotakan

Ciri-ciri regenerasi kepemimpinan yang demokratis di dalam partai politik adalah sebagai berikut:

1. Setiap pemilih dapat menjadi kandidat. Artinya, seluruh anggota atau kader partai dapat mecalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin, dengan catatan memenuhi syarat-syarat, kriteria dan memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini diperlukan model pengelolaan partai dengan pola inklusif yaitu pola yang tidak membatasi hak-hak anggota.
2. Pemimpin terpilih dipilih melalui pemilihan yang objektif dan terbuka, dan berdasarkan hasil suara terbanyak, bukan melalui penunjukan.
3. Ada konstitusi yang membatasi kekuasaan, seperti perodesasi masa jabatan kepemimpinan, sehingga dapat membatasi kekuasaan dengan maksud untuk menghindari perolehan kekuasaan secara terus-menerus, sehingga dapat memberi kesempatan kepada kader-kader potensial untuk menjadi pemimpin.

#### **E.7. PDI-P**

PDI-P merupakan singkatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, adalah salah satu partai politik yang memiliki kekuatan politik besar yang ada di Indonesia. Partai ini dipimpin oleh Megawati

Sekelompok sebagai ketua umum PDI P menganut paham marhaenisme



dan berazaskan pancasila sebagai ideologi partai, dan memiliki slogan sebagai partainya *wong cilik*.

PDI-P merupakan salah satu partai politik dari sekian banyak partai di Indonesia yang mekanisme pengambilan keputusannya sejauh ini masih bersifat sentralistik figur. Akibatnya, ketua umum menjadi penentu sentral dalam setiap kebijakan dan keputusan partai. Keadaan demikian, diperkuat pula dengan diberikannya hak prerogatif kepada Ketua Umum DPP PDI-P yaitu Megawati Soekarnoputri pada saat kongres PDI-P di Semarang. Sehingga apapun yang menjadi keputusan Megawati, maka hal itu berada diatas struktural partai. Dengan posisi ini, semua kader partai harus tunduk pada keputusan sang Ketua Umum, dan setiap kader wajib mengamankan rekomendasi yang diputuskan oleh Ketua Umum tersebut. Sebab jika mengingkari keputusan Ketua Umum berarti menentang Ketua Umum. Hal ini berlaku untuk segala keputusan politik yang dikeluarkan oleh partai disetiap tingkatan. PDI-P sesungguhnya tidak melarang adanya aspirasi, namun ketika pihak DPP telah memutuskan, maka semua anggota harus patuh dan mengamankan keputusan itu. Hal tersebut dimaksudkan untuk loyalitas setiap kader kepada pimpinan tertinggi partai.<sup>63</sup>

Kuatnya pengaruh dan dominasi Megawati sebagai ketua umum dalam tubuh PDI-P telah menyebabkan terjadinya sentralisasi kekuasaan pada satu nama. Sentralisasi kekuasaan inilah yang kemudian menyebabkan semua keputusan akhir dari seluruh proses politik di tingkat

---

<sup>63</sup> Budi Prayitno, "Pelebagaan Politik PDI-P Jateng", Tesis Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, Hal. 8 dan 10

nasional dan tingkat daerah pada akhirnya berada di tangan elit pimpinan pusat.<sup>64</sup>

Dalam contoh kasus, pada Pilkada dan Pemilu legislatif tidak ada kewajiban formal bagi DPP PDI-P akan mengusung calon yang diajukan dewan pimpinan Parpol tingkat daerah. Sehingga siapapun kandidat yang ingin maju dalam pertarungan Pilkada serta Pemilu legislatif di segala tingkatan baik itu di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota harus mendapat restu dari Megawati. Fakta ini kian membuktikan bahwa tingkat otonomi PDI-P disetiap tingkatan daerah harus berkolerasi dengan keinginan dari Megawati selaku Ketua Umum. Sehingga, keputusan politik yang tidak sejalan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak prerogatif yang dimiliki Megawati selaku ketua umum PDI-P.<sup>65</sup>

Kuatnya pengaruh dan dominasi Megawati juga menimbulkan pengaruh terhadap kepemimpinan di PDI-P. Dengan pengaruh yang dimiliki Megawati tersebut, maka regenerasi kepemimpinan di tingkat pusat atau yang biasa disebut dengan ketua umum partai tidak beranjak dari figur Megawati. Hal ini nampak pada perodesasi yang sudah memasuki periode ketiga Megawati memimpin atau menjadi ketua umum PDI-P.

Dalam hal perolehan suara, PDI-P pertama kalinya mengikuti Pemilu pada tahun 1999, dan berhasil meraih suara terbanyak yaitu 34%. Dengan perolehan suara terbanyak tersebut PDI-P dinyatakan menjadi

pemenang Pemilu tahun 1999. Namun pada Pemilu–Pemilu selanjutnya, PDI-P mengalami penurunan perolehan suara. Pada Pemilu 2004, partai ini mengalami penurunan perolehan suara yang dapat dikatakan turun drastis, yaitu hanya memperoleh 18,5% suara. Selanjutnya pada Pemilu 2009, PDI-P mengalami penurunan perolehan suara lagi, yaitu menjadi 14%.<sup>66</sup> Secara teoritis dari perolehan suara PDI-P tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintahan yang dilaksanakan oleh partai pemegang kekuasaan pada tahun 1999–2003 tersebut belum dapat memuaskan publik.<sup>67</sup> Sehingga pada Pemilu selanjutnya partai yang dipimpin Megawati ini mengalami kekalahan dua kali berturut–turut dengan persentase perolehan suara yang menurun drastis.

Dari penjelasan tersebut, maka menarik perhatian penulis untuk memilih PDI-P untuk dijadikan objek penelitian, dengan alasan sebagai berikut:

1. PDI-P merupakan satu–satunya partai politik di Indonesia yang dari awal berdirinya hingga sekarang tidak terjadi pergantian ketua umum selama tiga (3) periode berturut–turut, atau dengan kata lain tidak terjadi regenerasi kepemimpinan pada partai tersebut. Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik seharusnya benar–benar menerapkan prinsip–prinsip demokrasi, karena menduduki jabatan dalam waktu yang lama

---

<sup>66</sup> Saiful Mujani, R. Wiiliam Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisa Tentang*

dapat membawa bahaya untuk demokrasi. Hal tersebut menjadi alasan utama mengapa penulis memilih PDI-P sebagai objek penelitian.

2. PDI-P merupakan salah satu partai lama yang memiliki kekuatan politik yang besar, dan sangat berpengaruh dalam kancah perpolitikan di Indonesia.
3. PDI-P dengan perolehan suara yang terus menurun pada Pemilu 2004 dan 2009 tetap menempatkan Megawati sebagai ketua umum PDI-P. Hal ini menjadi faktor pendukung tersendiri bagi peneliti, karena dengan demikian bukan tidak mungkin bahwa PDI-P akan mencalonkan kembali Megawati untuk bertarung pada Pemilu 2014. Meskipun saat ini ada nama lain seperti Jokowi yang elektabilitasnya jauh lebih tinggi dari Megawati, namun keputusan penetapan capres tersebut masih tergantung pada otoritas Megawati yang begitu kuat sebagai figur sentral di PDI-P.

## **F. Defenisi Konseptual**

### **F.1. Demokrasi**

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan rakyat) atas negara, untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut, dan

menghindari terjadinya otoritarianisme dan kemungkinan kolusi/konspirasi yang sangat mungkin muncul dalam sistem monarki dan oligarki.

### **F.2. Demokratisasi**

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan, sehingga diharapkan dapat tercapai sistem yang demokratis atau terbentuknya kehidupan politik yang lebih demokrasi.

### **F.3. Oligarki**

Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang atau di dominasi oleh sekelompok kecil elit (minoritas) atas organisasi demi kepentingan mereka sendiri, yang mana kekuasaan para elit tersebut susah untuk digantikan dengan kelompok lain, karena pengaruh kekuatan politik yang begitu kuat yang dimiliki para kelompok elit minoritas tersebut.

### **F.4. Partai Politik**

Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi dan juga sebagai infrastruktur politik yang ikut serta dalam penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi terhadap sistem pemerintahan negara, dan merupakan alat untuk menarik perhatian/kegiatan publik dan politik

### **F.5. Kepemimpinan**

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan fisik, sehingga orang-orang yang dipimpin menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka, dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi.

### **F.6. Regenerasi Kepemimpinan**

Regenerasi kepemimpinan adalah sirkulasi kekuasaan pemimpin sebagai penerus pemimpin sebelumnya yang telah memimpin dalam masa periode yang ditentukan, dengan maksud untuk memberikan harapan-harapan baru yang memungkinkan untuk mendorong terjadinya perubahan yang lebih menjanjikan bagi kemajuan organisasi, baik itu bangsa, negara dan partai politik, sekaligus sebagai bentuk pemeliharaan terhadap sistem demokrasi.

### **G. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang akan diteliti. Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## G.1. Demokratisasi Partai Politik

### 1. Mekanisme pengambilan keputusan

- Menerapkan sistem desentralisasi, yaitu pola pengambilan keputusan melalui pola *bottom up* karena dapat mengakomodasi aspirasi–aspirasi yang datang dari bawah, dan menghindari pola *top down* karena dapat membawa kecenderungan pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik.

### 2. Konsisten menerapkan elemen–elemen demokrasi

- Kompetisi, yaitu persaingan yang harus dilakukan secara sehat dalam upaya meraih jabatan/ kekuasaan.
- Partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, yaitu pemilihan yang dilakukan secara bebas dan teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan.
- Kebebasan politik, yaitu kebebasan dan kesamaan hak politik bagi semua kader partai untuk mengekspresikan dirinya, termasuk untuk ikut menjadi peserta kompetisi dalam meraih jabatan/ kekuasaan (tidak ada monopoli kekuasaan politik), dengan maksud untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik

## **G.2. Regenerasi Kepemimpinan yang Demokratis**

### 1. Mekanisme pergantian kepemimpinan/ proses pergantian ketua umum

- Seleksi, yaitu penentuan kriteria calon yang layak atau dapat masuk dalam kandidasi.
- Penominasian, yaitu penentuan calon yang memenuhi syarat sebagai kandidasi.
- Pemilihan, yaitu penentuan siapa calon yang memenangkan kompetisi melalui pemilihan.

### 2. Model pengelolaan partai dengan model inklusif

- Setiap pemilih dapat menjadi kandidat, dengan catatan memenuhi syarat-syarat, kriteria dan memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin.

### 3. Sirkulasi kepemimpinan yang objektif dan terbuka

- Pemimpin atau ketua umum terpilih dipilih dan diganti berdasarkan hasil suara terbanyak dan dilakukan dengan frekuensi yang relatif sering, adil dan dengan pemilihan yang bebas. Dengan maksud pembatasan kekuasaan untuk menghindari perolehan kekuasaan secara terus-menerus.

- Mematuhi konstitusi yang membatasi kekuasaan melalui perundangan yang ditetapkan partai



#### 4. Faktor penentu seseorang untuk dapat terpilih menjadi pemimpin

- *Operational leadership*, yaitu orang yang memiliki banyak inisiatif, menarik, dinamis, dapat menunjukkan prestasi kerja, dan memiliki pengabdian yang tulus terhadap organisasi.
- *Popularity*, yaitu memiliki popularitas yang baik.
- *The assumed representative*, yaitu orang yang dapat mewakili kelompoknya.
- *The prominent talent*, yaitu orang yang memiliki potensi atau bakat kecakapan yang menonjol.

### **H. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara kerja yang digunakan dalam penelitian untuk memahami objek penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada studi kualitatif.

Menurut Nazir, Penelitian deskriptif adalah metode penelitian tentang sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kejadian pada masa sekarang.<sup>68</sup> Selanjutnya Bogdan dan Taylor, menyatakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

<sup>68</sup> Nazir, M. L. E. *Metode Penelitian*. Ghelita Indonesia Lembang, B. M., 1983. Hal. 63

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>69</sup>

Secara umum menurut Surachmat, penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Memusatkan penelitian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, yaitu masalah yang aktual.
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.

Sedangkan bentuk penelitiannya adalah studi kasus, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Arikunto, bahwa penelitian kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.<sup>71</sup>

### **H.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Jakarta tepatnya di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) yang beralamat di Jalan Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan.

---

<sup>69</sup> Bogdan dan Taylor dalam Lexy J moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1990, Hal. 3

<sup>70</sup> Surachmad Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982, Hal.140

<sup>71</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Berkeadilan*, Bandung: Bumi Aksara, 1996 Hal

## H.2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika kita bicara tentang subyek penelitian, maka sebetulnya berbicara tentang unit analisa, yaitu subyek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.<sup>72</sup> Adapun yang dijadikan subyek penelitian oleh peneliti dalam membuat skripsi ini adalah: pertama ketua umum PDI-P yaitu Megawati Soekarnoputri, namun dikarenakan berbagai alasan maka peneliti terpaksa mengganti subyek tersebut dengan Sekjen PDI-P, yaitu Bapak Tjahjo Kumolo. Kedua adalah kader-kader PDI-P yang bersedia untuk menjadi unit analisa untuk memberikan data-data yang diperlukan peneliti. Ketiga adalah para pengamat politik.

## H.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni jenis data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>73</sup> Yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak terkait

<sup>72</sup> *Ibid.*, Hal 145

<sup>73</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hal.254

dengan objek yang diteliti, yaitu pengurus PDI-P dan pengamat politik.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder dapat berupa data bacaan dari berbagai sumber yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, sampai dokumen-dokumen resmi, majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, hasil survey, studi histori, dan sebagainya. Oleh karena itu, yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang mendukung yang berkaitan dengan judul penelitian, yakni data-data mengenai obyek penelitian.

### **H.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara dimana data dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data.<sup>74</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan untuk mengetahui konsep penelitian (atau yang terkait dengannya). Percakapan ini

---

<sup>74</sup> Senofoeb Feisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Ada dua jenis wawancara, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak-terstruktur (*in-depth interview*). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Jenis wawancara ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

Sementara itu, wawancara tak-terstruktur (*in-depth interview*) merupakan wawancara yang berbeda dengan wawancara terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara tak-terstruktur (*in-depth interview*) menekankan pada pengecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan  
Selian PDI P. (Tikha Kumala) Ketua Bidang Keanggotaan

Kaderisasi dan Rekrutmen PDI-P (Idham Samawi). Para pengamat politik (Ari Dwipayana, Effendi Gazali dan Hanta Yudha).

## 2. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis atupun film. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Menurut Lexy J. Moleong ada dua jenis dokumen, yaitu: pertama, dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Maksud pengumpulan dokumen pribadi adalah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subyek penelitian. Dokumen pribadi berupa buku harian, surat pribadi, dan otobiografi.

Kedua, dokumen resmi. Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, laporan rapat (Rakernas), instruksi. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya: majalah, bulletin, pernyataan, hasil-hasil studi, hasil survey, studi

## **H.5. Teknik Analisis Data**

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka datanya berupa kata-kata yang bukan angka-angka. Kata-kata sering hanya mengandung makna dalam konteks kata itu digunakan. Maka analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian dan akan segera dianalisis sejak awal agar tidak terjadi penumpukan data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

### **2. Penyajian Data (Data Display)**

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

### **3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi**

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan

mencari pola, model, tema, hal-hal yang sering muncul, dan makna dari setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi. Jadi dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Selanjutnya verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian